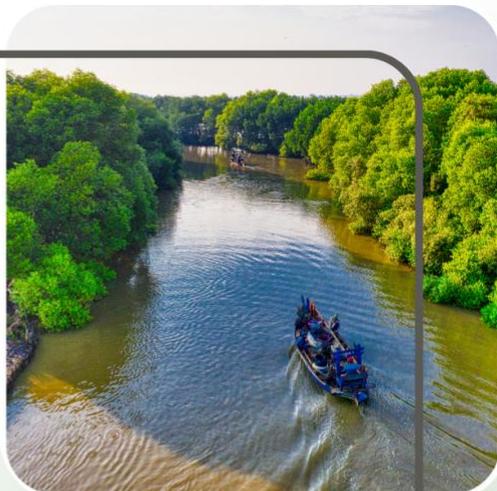
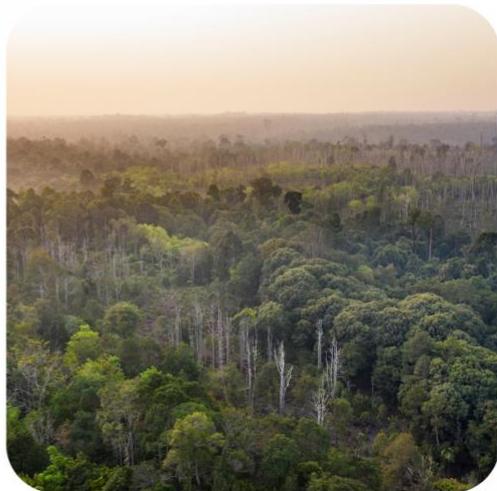




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



## DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

+62 21-23951100

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat.

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2024

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan  
Lingkungan dan Kehutanan



**Nani Hendiarti**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	4
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	5
2.1.1 VISI & MISI.....	10
2.1.2 SASARAN STRATEGIS.....	11
2.2 PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.3 PENGUKURAN KINERJA.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	14
3.1.1 SASARAN STRATEGIS 1 .....	15
3.1.2 SASARAN STRATEGIS 2 .....	17
3.1.3 SASARAN STRATEGIS 3 .....	19
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1. INTERNAL.....	49
4.2. EKSTERNAL .....	49
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI..... 7  
GAMBAR 2 SASARAN STRATEGI..... 11  
GAMBAR 3 CAPAIAN IKLH, IKA, IKU, DAN IKTL TAHUN 2015 – 2021 ..... 16

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1 PERENCANAAN KERJA..... 12  
TABEL 2 INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN..... 14



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178/S Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 memuat 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja ini mengalami perubahan dari Rencana Strategis 2020 – 2024 disebabkan penyederhanaan indikator kinerja menggunakan Logical Framework Approach (LFA). Perbedaan tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Penyederhanaan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

RENCANA STRATEGIS 2020 -2024				PERJANJIAN KINERJA 2023			
SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
<i>Stakeholder Perspective</i>							
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	SP.1	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan berkelanjutan	1	Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	PDB Kehutanan Pertumbuhan 2019: -0,23%			2	Persentase Pengurangan Sampah Laut

<i>Customer Perspective</i>							
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Tingkat kesiapan pemanfaatan Kawasan Hutan				
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu				
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air				
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah				
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional				
<i>Internal Business Process Perspective</i>							
SS.8	Tersedianya rancangan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Jumlah Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	SS.2	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3	Persentase rekomendasi bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
SS.9	Tersedianya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	9	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan			4	Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi				
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11	Nilai PMPRB Deputy	SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy			6	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13	Nilai IKPA Deputy				

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada saat berakhirnya tahun 2023 ini dilaporkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang



Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 adalah 101,389% dengan Predikat Istimewa. Pada indikator kinerja (1) Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC telah tercapai 120% dan untuk indikator kinerja (2) Persentase Pengurangan Sampah Laut telah tercapai sebesar 81,97%. Untuk Indikator Kinerja (3) Persentase rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan; dan (4) Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan telah 100% dilakukan penyusunan Rancangan Kebijakan/Policy Brief serta Laporan Pemantauan Isu Strategis. Kebijakan-kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator dan/atau Kementerian/Lembaga terkait. Untuk indikator (6) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah tercapai 74,95 dari target 72 sesuai dengan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat sementara untuk (5) Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2023 tidak diperoleh hasil penilaian karena penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator yang belum tercapai yaitu indikator kinerja (2) Pengurangan Sampah Laut 41,68% dari target 50,85% (capaian 81,97%). Langkah-langkah strategis untuk menaikkan capaian akan terus dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.

Untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai Sasaran Program dan Indikator Kinerja serta pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi pada tahun 2023, Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran pada DIPA awal yang terbit pada bulan November 2022 berjumlah Rp14.500.000.000,- (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah). Dengan alokasi untuk masing-masing unit kerja yaitu Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Rp2.350.000.000,-, Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Rp1.650.000.000, Asisten Deputy Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan konservasi Sumber Daya Alam Rp2.000.000.000,-, Asisten Deputy Pengelolaan Sampah dan Limbah Rp 2.350.000.000,-, Asisten Deputy Pengelolaan perubahan Iklim dan Kebencanaan Rp2.750.000.000,-, dan Sekretariat Deputy Rp3.600.00.000,- (termasuk anggaran program prioritas sebesar Rp1.200.000.000,-. Dari total pagu tersebut, Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 terkena Automatic Adjustment sebesar



Rp208.384.000,- sehingga total pagu efektif tersisa Rp.14.291.616.000,-. Pada November 2023, Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 Tidak memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Bendahara Umum Negara (BUN).

Realisasi anggaran Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 pada tahun 2023 sebesar Rp. 14.248671.059,- atau sebesar 99,90% dari total pagu efektif. Jika dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya 99,60%, capaian realisasi ini lebih tinggi. Realisasi penyerapan anggaran Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pendukung antara lain kondisi pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda sehingga agenda dan kegiatan yang telah direncanakan khususnya kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder di daerah dapat berjalan semestinya.

Analisa terhadap capaian kinerja Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terdapat indikator mengalami kenaikan yaitu indikator : (1) Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC dan Indikator (6) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023. Sementara untuk beberapa indikator lainnya tidak dapat diperbandingkan karena indikator mengalami perubahan. Dari sisi anggaran, capaian realisasi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,3% dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2022. Dengan demikian penggunaan sumber daya anggaran cukup efisien karena anggaran digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan capaian kinerja rata-rata

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan fakta geografis, tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. 16.056 pulau telah diakui oleh PBB (dengan catatan, proses pembakuan masih terus berjalan) yang terbentang dari pulau Rondo di ujung Sumatera hingga ujung Merauke di Papua adalah fakta yang menegaskan hal tersebut. Namun tidak cuma itu, pulau-pulau yang terbentang di wilayah laut seluas 5.8 juta km<sup>2</sup> dalam wilayah Indonesia juga menegaskan posisi penting Indonesia sebagai sebuah benua maritim dengan wilayah laut mencakup 70% dari total wilayah dan terletak di posisi silang strategis jalur perdagangan dunia.

Sebagai negara yang berada pada poros perdagangan dunia, posisi silang Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus, namun Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karenanya upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020- 2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menurunkan emisi dan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon.

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan



penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran kinerja terkait pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Triwulan IV Tahun 2023. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

### 1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

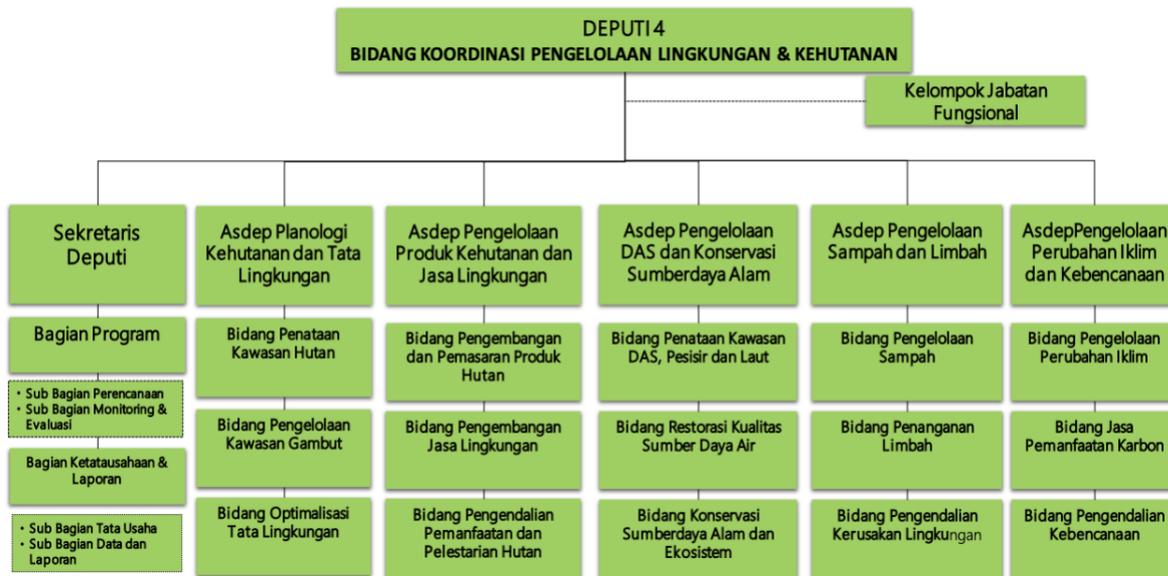
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. **Mengefektifkan jalannya** koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
2. **Mengoptimalkan** pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
3. **Melaksanakan** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara **tepat dan akurat**
4. **Membangun dan mengembangkan** kapasitas kelembagaan dan kompetensi di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang **responsif**; dan
5. **Melaksanakan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan **sesuai arahan**.

### 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan organisasi Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputy dan 1 (Satu) Sekretaris Deputy. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi

### 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat sembilan misi dimana aspek lingkungan hidup merupakan misi ke-4 yakni “Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”. Dalam mengimplementasikan misi tersebut, telah ditetapkan lima pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;



4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis yang terkait dengan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2023 yaitu :

1. Pemanfaatan kawasan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui program Perhutanan Sosial (PS);
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan, dalam hal ini terit dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
3. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
4. Pengendalian Penanganan Sampah Laut;
5. Pengendalian Kebijakan Resiko Bencana;
6. Pengendalian Kebijakan terkait *Carbon Pricing* (Nilai Ekonomi karbon);
7. Pengembangan *Food Estate* di Sumatera Utara.

## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah; penumpukan sampah/sampah plastik di daratan dan sampah laut yang bersumber dari aktivitas yang berbasis daratan maupun dari laut; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim global; perambahan kawasan hutan; kebakaran hutan dan lahan (karhutla) banjir rob akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut; penataan dan restorasi gambut; penataan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik; serta faktor-faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem hutan. Untuk itu pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia harus dirancang untuk dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal dengan tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Sehingga keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi lestari, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Dalam jangka panjang diperlukan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan hutan secara menyeluruh dengan skala yang lebih luas, mencakup penataan ulang alokasi sumber daya hutan, pemenuhan komitmen Indonesia dalam kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan/gambut, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sasaran pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia ke depan secara garis besar diarahkan pada perwujudan: 1) Lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; 2). Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk capaian nilai keekonomian optimum; 3). Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4). Tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan dan kehutanan yang semakin berdaya saing.

Penciptaan kondisi lestari secara ekologi, ekonomi dan sosial ini, seyogyanya ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan dan kehutanan



nasional yang berkelanjutan, karena bertujuan membuka kemanfaatan seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya lingkungan dan kehutanan mencakup spektrum yang lebih luas, sehingga tidak hanya berdampak dalam skala lokal maupun nasional, tetapi juga mampu menjawab tantangan internasional.

### 2.1.1 VISI & MISI

Visi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terlepas dari 5 (lima) sasaran strategis Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang sangat terkait dengan tugas fungsi Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai pengejawantahan dari Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; dan Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan tentunya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk itu Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Visinya adalah sebagai berikut:

#### **“MEMBANGUN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN**

#### **KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

#### **“MENJALANKAN EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”**

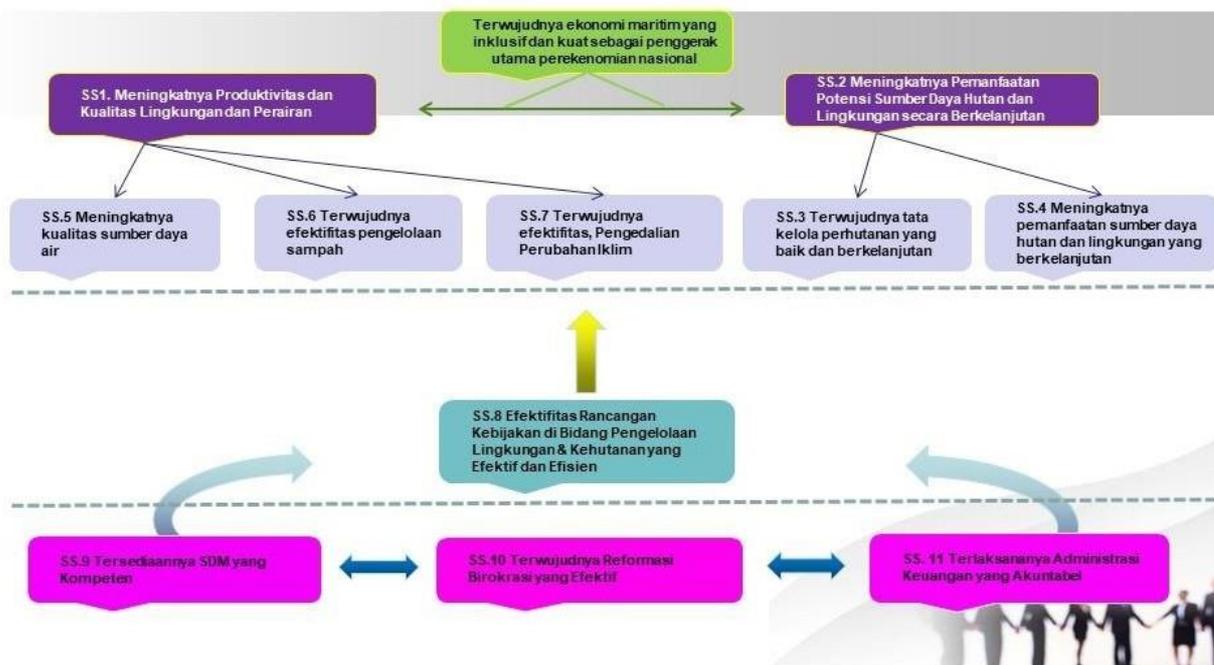
Misi tersebut merupakan langkah peran dan fungsi Kedeputian dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, tentang aspek lingkungan hidup (misi ke-4 dan agenda ke-6) dalam Pembangunan Nasional, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dan mampu merespon perubahan iklim.

Pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan Sampah dan Limbah; serta Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

### 2.1.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada Peta strategis berikut :



Gambar 2 Sasaran Strategis

Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan membagi sasaran kedeputian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective), perspektif pengguna (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal bussines



process perspective) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective).

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan melalui sasaran strategis utama yakni:

- 1) Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia; dan
- 2) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

## 2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dan dievaluasi per triwulan. Rencana dan target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perencanaan kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan	1	Persentase Kenaikan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC <i>Unconditional</i>	2%
		2	Persentase Pengurangan Sampah Laut	50,85%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelaan Lingkungan dan Kehutanan yan Ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan	5	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	90



Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Efisien	6	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	72
---	---	---	----

### 2.3 PENGUKURAN KINERJA

Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Triwulan IV Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan Tahun 2023 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui Nilai Kinerja Organisasi. Formula penghitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai kinerja, adalah sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
$X \geq 100$	$80 \leq X \leq 100$	$X \leq 80$
Memenuhi Kriteria	Belum Memenuhi	Tidak Memenuhi



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Capaian Kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja (kinerja yang direncanakan). Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan Tahunan. Dimana pada setiap Sasaran Strategis dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama diantaranya :

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
2. Membandingkan realisasi kinerja dampak dengan periode ini dengan jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI S.D TRIWULAN				CAPAIAN TAHUN 2023	
				I	II	III	IV		
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan	1	Persentase Kenaikan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC <i>Unconditional</i>	2%	-	-	-	42%	<b>(5,45%)</b>
		2	Persentase Pengurangan Sampah Laut	50,85%	-	-	-	37,74%	<b>(13,11%)</b>
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelaan Lingkungan dan Kehutanan yan Ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	<b>100%</b>
		4	Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%	25%	50%	75%	100%	<b>100%</b>
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Efisien	5	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	90	-	-	-	85,94	<b>95,48%</b>
		6	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	72	-	-	-	74,95	<b>104,09%</b>

Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan



### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan sebagai pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Pengelolaan lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023, dilaksanakan Analisis Capaian Kinerja untuk setiap Sasaran Kinerja yang diuraikan menurut Indikator Kinerja dari Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan hal-hal terkait Pelaksanaan, Kendala/permasalahan serta Solusi terhadap Kendala/permasalahan yang dihadapi.

Pada **Sasaran Strategis 1**: Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan, terdapat dua Indikator Kinerja, yaitu untuk Indikator Kinerja 1 : Persentase Kenaikan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target *NDC Unconditional* dengan target capaian 2% diakhir tahun. Dan untuk Indikator Kinerja 2 : Persentase Pengurangan Sampah Laut dengan target 50,85% diakhir tahun. Untuk **Sasaran Strategis 2** : Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, juga terdapat 2 Indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Ditindaklanjuti, dan Indikator kinerja 4 : Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan, dengan target Kinerja masing-masing 100% diakhir tahun dan target Pertriwulan sebesar 25%. Selanjutnya Untuk **Sasaran Strategis 3** : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Efisien, juga memiliki Indikator Kinerja yaitu, Indikator Kinerja 5 : Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, dengan target Nilai PMPRB sebesar 90, dan Indikator Kinerja 6 : Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dengan Target Nilai SAKIP sebesar 72 diakhir tahun.

### 3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja pada Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mengalami beberapa penyesuaian, sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan demikian untuk beberapa Indikator Kinerja belum bisa dicantumkan



perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Capaian Target

**A. Persentase Kenaikan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan	1	Persentase Kenaikan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC <i>Unconditional</i>	-	-	1,5%	47,45%	2%	42%
		2	Persentase Pengurangan Sampah Laut	25,90%	28,50%	38,50%	35,36%	50,85%	37,74%

***Unconditional***

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memiliki sasaran Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Capaian Penurunan emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC *Unconditional*. Capaian pada isu strategis ini adalah penurunan emisi GRK Nasional sebesar 42% dari *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2022.

Indonesia baru saja meningkatkan komitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri sampai dengan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dari sektor kehutanan, energi, limbah, pertanian, dan proses industri dan penggunaan produk yang termuat dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia yang telah dikumpulkan kepada Sekretariat UNFCCC pada akhir Tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai *Net-Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti yang tercantum dalam dokumen *Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050). Indonesia telah dan terus bekerja keras mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih awal sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta.

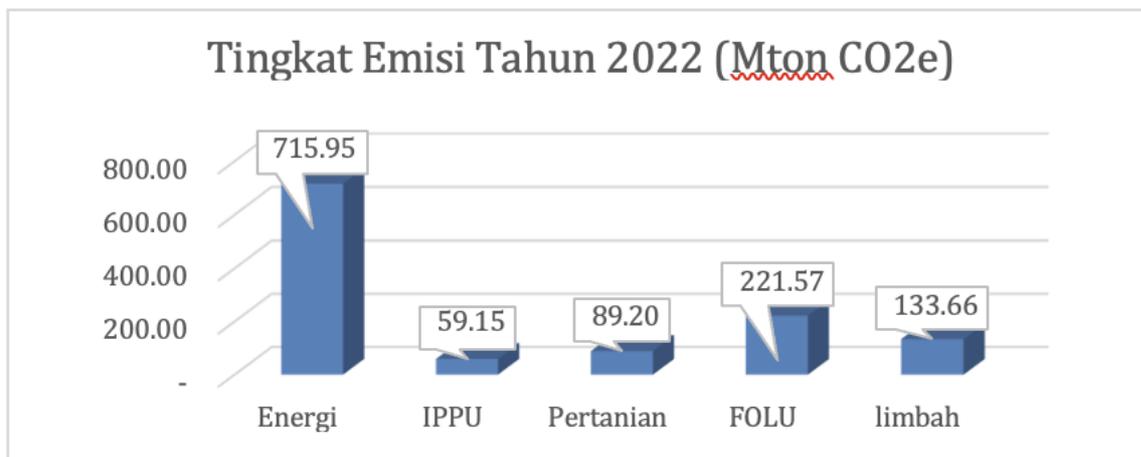
Berdasarkan PK yang telah disusun, target capaian IKU Persentase Kenaikan Capaian Penurunan emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC *Unconditional* adalah sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), total tingkat emisi naik sebesar 6,9 % dari tahun sebelumnya sebesar 47,45%. Namun, tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan BAU pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%.



Kendala yang saat ini terjadi antara lain; Isu yang kompleks dan multi- disiplin, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memutuskan dan atau menyepakati mekanismenya; Tidak bisa dilihat dari 1 sisi, memerlukan sudut pandang dari berbagai pihak terkait agar implementasi dapat berjalan lancar; Karena melibatkan berbagai pihak dan menjadi perhatian banyak lini maka penguatan komunikasi dan partisipasi aktif antar stakeholders terkait beberapa isu perlu diperdalam; Saling terkait dan kompleksnya hubungan isu antar Kementerian/ Lembaga terkait proses penyusunan peraturan turunan menyebabkan progress upaya terlihat lambat; dan Data kajian yang masih minim untuk dibawa ke forum international.

Di sisi lain saat ini juga terdapat kendala dalam proses perhitungan Penurunan emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC *Unconditional* yang membutuhkan koordinasi dengan 5 sektor terkait dalam NDC, sehingga dalam pemutakhiran data diperlukan waktu yang panjang yaitu 1 tahun. Saat ini perhitungan capaian yang telah dirampungkan merupakan perhitungan penurunan pada tahun 2022 lalu, untuk hasil perhitungan pengurangan emisi tahun 2023 akan dikeluarkan pada tahun 2024.

Sebagaimana data terkait dengan tingkat pengurangan emisi GRK dapat dilaporkan bahwa dari hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan tingkat emisi GRK di tahun 2022 sebesar 1.220 Mton CO<sub>2</sub>e yang diperoleh dari masing-masing kategori/sektor yakni Energi sebesar 715,95 Mton CO<sub>2</sub>e, Proses Industri dan Penggunaan Produk, sebesar 59.15 Mton CO<sub>2</sub>e, Pertanian sebesar 89,20 Mton CO<sub>2</sub>e, Kehutanan dan Kebakaran Gambut sebesar 221,57 Mton CO<sub>2</sub>e dan Limbah sebesar 133,66 Mton CO<sub>2</sub>e., dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: KLHK, 2023

Untuk keberhasilan di setiap sektornya, seperti FOLU (*Forestry and Other Land Use*), dengan memperhatikan hasil permantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 %. Dilihat dari data series setiap periode pengamatan mulai periode tahun 1996-2000, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.



Sektor energi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui proses transisi energi, khususnya pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Rencana Pengembangan PLT Berbasis EBT pada *Green RUPTL PLN 2021-2030*, pengembangan EBT akan memberikan manfaat tidak hanya dari segi upaya penurunan emisi GRK nasional, tetapi juga dari segi perekonomian masyarakat dengan total investasi sekitar USD 55,18 Miliar, membuka 281.566 lapangan kerja baru dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO<sub>2</sub>e.

Percepatan capaian target penurunan emisi GRK Nasional dapat ditempuh dengan berbagai strategi yaitu; 1) Percepatan melalui koordinasi kebijakan, langkah, serta kegiatan dalam lingkup mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional; 2) Penguatan integrasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah serta dari, untuk, dan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Implementasi Perpres NEK diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK; 3) Peningkatan kolaborasi dalam membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK dan transisi energi merupakan instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi GRK melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien dan efektif; 4) Penguatan dan penyusunan proses bisnis pengembangan EBT sebagai penyedia alternatif sumber energi dalam proses *early retirement coal power plant* dan *just energy transition* di Indonesia secara intensif dan menyeluruh dari aspek kebijakan, pendanaan, kolaborasi. Upaya pengembangan Energi Terbarukan merupakan salah satu upaya dalam mendorong peningkatan capaian pengurangan emisi GRK Nasional.

Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pengurangan emisi GRK Nasional sesuai target NDC pada Tahun 2030 mendatang dan berkontribusi dalam menjaga suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5<sup>0</sup> Celsius sehingga menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

## B. Persentase Pengurangan Sampah Laut

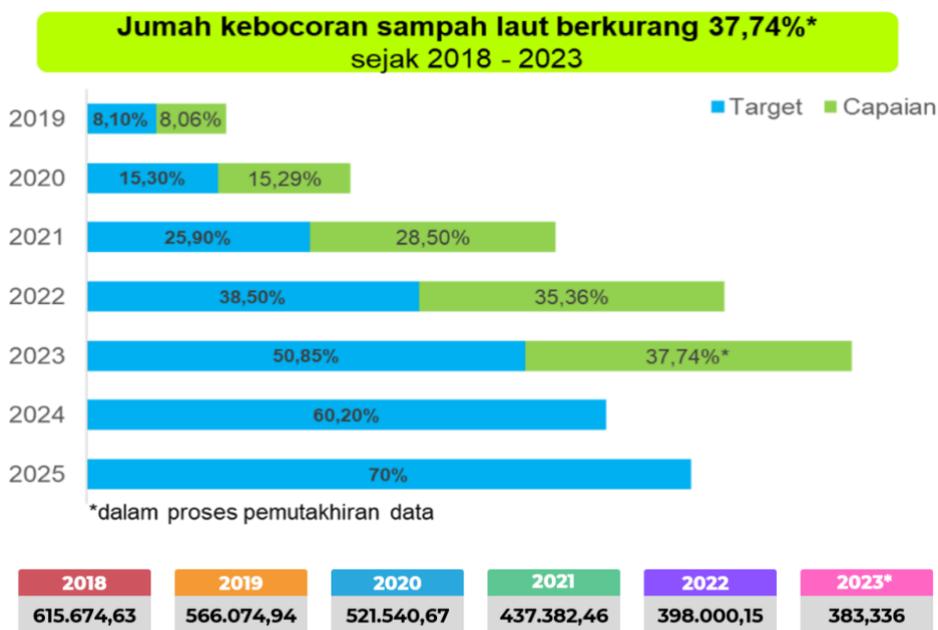
Pada Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah memiliki Isu Strategis yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Presentase Pengurangan Sampah Laut pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Capaian pada isu strategis ini adalah pengurangan kebocoran sampah ke laut sebesar 70% pada Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Sejak ditetapkannya Perpres pada tahun 2018, telah dibentuk 5 strategi penanganan sampah laut sebagai berikut; 1. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan; 2. Pengelolaan Sampah Bersumber dari Darat; 3. Pengelolaan Sampah di Pesisir dan Laut; 4. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum; 5. Penelitian dan Pengembangan. Strategi tersebut sebagai upaya percepatan capaian target presentase pengurangan kebocoran sampah laut 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun, target capaian isu strategis pada

B12 adalah terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi presentase pengurangan sampah laut. Dalam presentase pengurangan sampah laut, salah satunya telah dilaksanakan kegiatan pada strategi 3 (tiga) di bulan September 2023 yaitu aksi kolaborasi Program Kali Bersih di Kali Cilincing Jakarta yang diinisiasi oleh TNI AL. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di 78 wilayah di Indonesia dengan melibatkan ±14000 personil yang terdiri dari unsur TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga, Pemda dan Masyarakat dan menghasilkan sampah tidak terpilah sebesar 288,84ton

Kendala yang saat ini terjadi antara lain; tingkat pengumpulan sampah yang belum maksimal, anggaran tata Kelola system persampahan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, Lembaga pengelola sampah di daerah yang belum efektif, konsumsi plastic yang semakin meningkat, system persampahan di Pelabuhan dan objek wisata bahari yang belum optimal, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya belum optimal dan system pengelolaan data persampahan darat dan laut yang belum terintegrasi. Di sisi lain saat ini juga terdapat kendala dalam proses penghitungan capaian presentase pengurangan sampah laut tahun 2023 yang masih dalam pemutakhiran data, saat ini capaian presentase pengurangan sampah laut tahun 2023 sebesar 37,74% yang terdiri dari 349.661ton berasal dari sampah darat dan 33.675ton berasal dari sampah laut, dengan rincian sebagai berikut:



Percepatan capaian target 70% presentase pengurangan sampah laut pada tahun 2025 dapat ditempuh dengan berbagai strategi yaitu; 1. Meningkatkan Tingkat pengumpulan sampah; 2. Meningkatkan pelarangan penggunaan plastic sekali pakai atau turunannya di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; 3. Menerapkan skenario *extended Prodecer responsibility* (EPR) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk produsen; 4. Meningkatkan pengelolaan sampah di kapal penumpang dan Pelabuhan; 5. Mengintegrasikan seluruh platform data dan monitoring persampahan; 6. Menggencarkan kegiatan edukasi dan penyadartahuan publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat. Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian presentase pengurangan 70% kebocoran sampah ke laut pada Tahun 2025 dan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang tepat dari hulu ke hilir.

### Indikator Kinerja 3 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi



**Pengelaan Lingkungan dan Kehutanan yan Ditindaklanjuti.**

Indikator Kinerja ini merupakan keluaran dari Asisten Deputi yang selanjutnya ditindak lanjuti menjadi Ringkasan Kebijakan yang merupakan Keluaran Kebijakan dari Deputi. Pada tahun 2023, keluaran Dokumen Rumusan Kebijakan sebanyak 15 (Lima belas) Kertas Kerja Kebijakan dan untuk Rekomendasi Kebijakan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebanyak 6 (enam) dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai mana tercantum didalam table berikut :

Tabel. Daftar Keluaran Rumusan Kebijakan di Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

No	Judul Rumusan Kebijakan	Unit Kerja
1	Rumusan Kebijakan Pengendalian Kebencanaan	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
2	Rumusan Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
3	Rumusan Kebijakan Jasa Pemanfaatan Karbon	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
4	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Kerusakan Lingkungan	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
5	Kertas Kerja Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sampah	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
6	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Limbah	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
7	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai	Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
8	Kertas Kerja Kebijakan Strategi Kebijakan Restorasi Kualitas Sumber Daya Air	Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
9	Kertas Kerja Kebijakan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya	Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
10	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Penataan Kawasan Hutan Dan Perhutanan Sosial	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



11	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Dan Restorasi Ekosistem Kawasan Gambut	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
12	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Kebijakan Tora Dan Optimalisasi Tata Lingkungan	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
13	Kertas Kerja Kebijakan Kebijakan Pengembangan Dan Pemasaran Produk Kehutanan	Asisten deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
14	Kertas Kerja Kebijakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Jasa Lingkungan Dan Hasil Hutan Bukan Kayu	Asisten deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
15	Kertas Kerja Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Dan Pelestarian Hutan	Asisten deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan

Tabel. Daftar Keluaran Rekomendasi Kebijakan di Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

No	Judul Rumusan Kebijakan	Unit Kerja
1	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Unconditional	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
2	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
3	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA	Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
4	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
5	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunga	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Asisten deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan



Masing-masing Unit Asisten Deputi pada Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah Menyusun Rumusan Kebijakan Berupa Kertas Kerja Kebijakan dan Rancangan Kebijakan/*Policy Brief* sebagai keluaran Deputi. Dokumen keluaran tersebut serta dokumen pendukung lainnya sudah diunggah melalui *Cloud Maritim* sehingga capaian 100% pada Indikator Kinerja 3 ini telah tercapai.

**Indikator Kinerja 4 : Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan.**

Indikator kinerja ini menunjukkan Isu Strategis yang berasal dari *Major Project*, Janji Presiden dan atau Proyek Strategis Nasional (PSN) dibidang Lingkungan dan Kehutanan yang dapat diselesaikan sesuai target, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel. Daftar Laporan Isu- Isu Strategis di Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

No	Isu Strategis	Dokumen Pendukung
1	Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Sampah Laut	Laporan Presentase Pengurangan Sampah Laut
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional	Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2023
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat Persemaian	Laporan Progres koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat Persemaian
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi melalui Optimalisasi Lahan Marginal	Laporan peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi Melalui Optimalisasi Lahan Marginal
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis B3	Laporan Percepatan Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash Pada Tahun 2023
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum	1. Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2023; 2. Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati



		Tahun 2023; 3. Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Tahun 2023
--	--	--

**Capaian Kinerja dan Upaya yang Dilakukan**

Laporan Isu Strategis memuat pembahasan capaian hasil Koordinasi dan Sinkronisasi yang telah dilakukan, realisasi kegiatan dan kesimpulan. Seluruh laporan, dan Dokumen pendukung keluaran tersebut serta dokumen pendukung lainnya sudah diunggah melalui *Cloud Maritim* sehingga capaian 100% pada Indikator Kinerja 3 ini telah tercapai.

**Indikator Kinerja 5 : Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.**

Target dari Indikator Kinerja ini merupakan Capaian Nilai PMPRB yang merupakan hasil Penilaian mandiri oleh Inspektorat yang selanjutnya di evaluasi Kembali oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, Namun pada tahun 2023 tidak terdapat data nilai evaluasi Mandiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 pelaksanaan Reformasi birokrasi (RB) diubah menjadi RG *General* dan Tematik. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah mengidentifikasi program/kegiatan dan menyusun rencana kerja RB yang terfokus pada isu- isu tematik Tahun 2023. Sedangkan untuk pelaksanaan RB General adalah melanjutkan berbagai penyelesaian permasalahan tata kelola birokrasi, sebagaimana taber berikut :



Tabel. Daftar Isu- Isu Strategis rencana Kerja RB Tematik di Lingkungan Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)	HASIL	DAMPAK	PROGRES PELAKSANAAN S.D TRIWULAN IV
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Percepatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial	1. Tersusunnya regulasi percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial Terkoordinasinya distribusi akses kelola dan peningkatan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Terbitnya regulasi terkait percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permenko Marves tentang Tim Pelaksana Teknis Pokjanas Perhutanan Sosial Terkoordinasinya distribusi akses kelola Perhutanan Sosial seluas 250.000 ha	1. Penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi berbagai pihak yang bergerak di Perhutanan Sosial; 2. Peningkatan dukungan pendanaan, baik dari APBN, APBD, Hibah/Bantuan Luar Negeri, CSR Perusahaan, dan sumber pendanaan lain; Memberikan kesempatan bagi masyarakat di kawasan hutan dalam mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lima skema PS.	<p><b>TW 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi draf RPerpres Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial</li> <li>koordinasi distribusi akses Perhutanan Sosial seluas 6.101,87 ha.</li> <li>Rakornis Pemetaan Dukungan Pendanaan Alternatif untuk Peningkatan Kinerja KUPS (kerjasama dengan the Asia Foundation);</li> <li>Fasilitasi Pembentukan Pokja PPS Provinsi Banten</li> <li>Fasilitasi Pelaksanaan Pertemuan Nasional Pengarusutamaan Gender Perhutanan Sosial untuk Perempuan dan Generasi Muda.</li> </ol> <p><b>TW 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan Perpres Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial</li> <li>Distribusi akses Perhutanan Sosial seluas 204.914,5 ha</li> <li>Rakor dan Verifikasi Lapangan Integrasi Pemberdayaan Perhutanan Sosial di Sumatera Utara bersama Kementerian/Lembaga serta Swasta dan BUMN</li> </ol>



							<p>Koordinasi Pembahasan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dengan Skema Perhutanan Sosial untuk Food Estate Sumatera Utara</p> <p><b>TW 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RPermenko Marves tentang Tim Pelaksana Teknis Pokjanas Perhutanan Sosial</li> <li>2. Distribusi akses Perhutanan Sosial seluas ±850.000 ha</li> <li>3. Sosialisasi Perpres No. 28/2023 dalam Festival Perhutanan Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan di Sumatera Utara bersama KL serta Swasta dan BUMN</li> </ol> <p>Koordinasi Pembahasan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dengan Skema Perhutanan Sosial untuk Food Estate Sumatera Utara</p> <p><b>TW 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RPermenko Marves tentang Tim Pelaksana Teknis Pokjanas Perhutanan Sosial</li> <li>2. Distribusi akses Perhutanan Sosial seluas 6,37 juta ha secara kumulatif</li> <li>3. Sosialisasi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial</li> </ol>
2	Peningkatan Realisasi Investasi	-	-	-	-		

3	Transformasi Digital	Koordinasi Kebijakan terkait Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan	Tersusunnya PKS (Perjanjian Kerja Sama), proses bisnis, kelompok kerja Interkoneksi tahap 1. Interkoneksi sistem informasi produk industri kehutanan (SIPHL dan SIINas) untuk pertukaran dan penggunaan data dan informasi bahan baku kayu dan produk olahan kayu dari KLHK ke Kemenperin, atau sebaliknya	Asdep Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Terbitnya SK Pokja (kelompok kerja) Interkoneksi, Ditandatanganinya PKS, Tersusunnya Proses Bisnis Tahap I dan Tahap II, serta Interkoneksi SIPHL dan SIINas Tahap I berhasil	<p>1. Terpenuhinya kebutuhan kayu di industri lanjutan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;</p> <p>2. Adanya data pemanfaatan kayu di industri lanjutan baik dari jenis dan volume;</p> <p>Mengurangi peluang keberterimaan kayu ilegal pada pasar domestik.</p>	<p><b>TW 2:</b></p> <p>1. Telah dilakukan rakornis tim teknis percepatan pelaksanaan interkoneksi data hulu hilir dan tahapan implementasi interkoneksi sistem informasi hulu hilir produk industri kehutanan.</p> <p>2.</p> <p>Penyusunan Proses bisnis Interkoneksi SIPHL dan SIINas.</p> <p><b>TW 3:</b></p> <p>1. Terlaksananya konsinyering dengan hasil sinkronisasi data, ditemukan 269 industri primer yang memiliki akun SIINas dari 647 industri primer dan 1.953 industri lanjutan (KBLI 161, 162, 31001) Tersusunnya Keputusan Menko Marves tentang Pokja Interkoneksi SIPIK</p> <p><b>TW 4:</b></p> <p>1. Tersusunnya draf PKS Kemenko Marves, Kemenperin dan KLHK sebagai payung hukum tim teknis untuk interkoneksi sistem informasi SIPHL dan SIINas</p> <p>2. Terlaksananya Konsinyering pembahasan mapping dan matching data SIINas - SIPHL, serta simulasi interkoneksi melalui dummy API</p>
4	Laju Inflasi	-	-	-	-		
5	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-		

6	Prioritas Presiden	Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi melalui Optimalisasi Lahan Marginal	Terkoordinasinya pengembangan Food Estate Sumatera Utara dan Papua	Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya AoI dan Masterplan Pengembangan FE Sumut dan Papua</li> <li>2. Tersusunnya Perpres Pengembangan Pangan Nasional</li> <li>3. Terkoordinasinya Pelaksanaan Budidaya FE Sumut Terlaksananya Monev Pengembangan FE Sumut</li> </ol>	<p>Terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui pengembangan Food Estate;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat;</li> <li>3. Meningkatnya nilai tukar petani provinsi dengan kisaran 105-107.</li> </ol>	<p><b>TW 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan penyusunan Area of Interest FE Sumut ±11.790 ha</li> <li>2. Koordinasi penyusunan Rancangan KepmenPPN tentang Masterplan Food Estate</li> <li>3. Koordinasi Pembahasan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dengan Skema Perhutanan Sosial untuk Food Estate Sumatera Utara</li> <li>4. Monev pengembangan budidaya kawasan Food Estate</li> </ol> <p><b>TW 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Perkembangan Dukungan Infrastruktur Irigasi FE Sumut di Kabupaten Humbang Hasundutan</li> <li>2. Kunjungan Lapangan dan Rakornis Food Estate Sumut</li> <li>3. Koordinasi Penyusunan Matriks Monev Masterplan FE Sumut</li> <li>4. Monev internal pengembangan budidaya kawasan Food Estate Bimbingan Teknis Manajemen Basis Data untuk Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Food Estate</li> </ol> <p><b>TW 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Level Eselon I terkait Capaian Program Food Estate</li> <li>2. Koordinasi Penyusunan R.Perpres Peningkatan Cadangan Pangan Nasional (FE)</li> <li>3. Penyusunan AoI Food Estate Papua di Kab. Keerom</li> </ol> <p>Koordinasi Pembahasan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dengan Skema Perhutanan Sosial untuk Food Estate Sumatera Utara</p> <p><b>TW 4:</b></p>
---	--------------------	--	--	---	---	---	---

							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Progres Program Food Estate</li> <li>2. Koordinasi Penyusunan R.Perpres Badan Otorita Pengelola Food Estate Sumatera Utara</li> <li>3. Finalisasi AoI dan Masterplan Food Estate Papua di Kab. Keerom</li> </ol>
		<p>Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menunjang Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi/Food Estate</p>	<p>Terbangunnya Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 5 Ha</p>	<p>Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan TSTH2 tahap I telah diselesaikan pada bulan April 2023</li> <li>2. Pembangunan TSTH2 tahap II dalam proses penyusunan DED dan pekerjaan konstruksi direncanakan dimulai pada Oktober 2023</li> </ol> <p>Penyusunan program riset bersama antar universitas dalam negeri dalam bentuk konsorsium antar Universitas yang diketuai oleh IT Del.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui penyediaan benih hortikultura unggul dan bebas penyakit</li> <li>2. Meningkatnya kemampuan Indonesia dalam pengembangan obat</li> </ol> <p>Terbangunannya pusat pengembangan obat berstandar internasional</p>	<p><b>TW 1:</b> Telah dilakukan optimalisasi aspek perencanaan dimana perlu didetailkan kembali sesuai dengan kebutuhan mengingat ketersediaan anggaran.</p> <p><b>TW 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pembangunan TSTH2 Tahap 1;</li> <li>2. Melakukan peningkatan fasilitas tahap I dan rencana pembangunan TSTH2 Tahap II;</li> <li>3. Agar bangunan TSTH Tahap I dapat segera dimanfaatkan, dilakukan serangkaian kegiatan administratif dimana Kemenristekdikbud ditunjuk sebagai penerima aset dan IT-Del sebagai pengelola TSTH2.</li> </ol> <p><b>TW 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan koordinasi terkait perbaikan defect list dalam masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 6 November 2023 dengan pihak Kementerian PUPR dan kontraktor.</li> <li>2. Telah dilakukan koordinasi terkait serah terima aset TSTH2 dengan pihak-pihak terkait.</li> </ol> <p><b>TW 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan tahap 1 telah selesai</li> </ol>

							<p>dilakukan namun masih ada beberapa defect list yang akan diperbaiki secara paralel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. BAST Serah Terima BMN Aset TSTH2 telah dilakukan oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian Dikbud Ristek</li> <li>3. IT Del telah menyampaikan Surat Permohonan dan Proposal Untuk Pengoperasian BMN TSTH2 kepada Kemendikbud Ristek</li> <li>4. Lelang Pembangunan TSTH2 Tahap 2 telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya</li> </ol>
		<p>Pengawasan Perpres 15 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (PPK DAS Citarum)</p>	<p>Indeks Kualitas Air di DAS Citarum Tahun 2025 menjadi 60 poin</p>	<p>Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis pemantauan kualitas air pada 258 titik pantau, Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai Ultimate Goals Kegiatan PPK DAS Citarum tahun 2022 yaitu sebesar 51,01 Poin atau meningkat sebesar 0,88 poin dari capaian IKA tahun 2021. Namun, masih diperlukan upaya untuk mempercepat kenaikan IKA sesuai target tahun 2022 yakni 57 poin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keseimbangan antara upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>2. Meningkatnya pengelolaan kondisi tata air dan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung lingkungan DAS;</li> <li>3. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air;</li> <li>4. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air baku dan prasarana/sarana rekreasi air;</li> </ol> <p>Meningkatnya pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>	<p><b>TW 1:</b> Telah dilakukan koordinasi antara pihak Satgas Citarum dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</p> <p><b>TW 2:</b> Telah dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi antara Satgas dan pihak Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</p> <p><b>TW 3:</b> 1. Komando Sektor 9 Citarum Harum telah melakukan penanaman pohon yang bekerja sama dengan PT AstraZeneca yang akan menyumbangkan 40 juta. Hal ini agar terus dikembangkan, khususnya di hulu. 2. Diharapkan PPK DAS Citarum berkelanjutan pada pemerintahan yang akan datang pada tahun 2024.</p> <p><b>TW 4:</b> 1. Telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan dan Rakor Menko Marves PPK DAS Citarum pada tanggal 29 Agustus 2023 2. Realisasi reforestasi AstraZeneca di DAS Citarum</p>

							<p>sampai saat ini telah mencapai total 4.118.369 pohon dengan 37 jenis pohon di lahan seluas 13.963 ha (Reforestasi DAS Citarum – AstraZeneca)</p> <p>3. Telah diselenggarakan pelatihan uji tuntas HAM dan lingkungan (Environmental and Human Rights due Diligence/EHRDD) untuk bisnis/perusahaan/industri yang berada di kawasan Sungai Citarum (Kolaborasi dengan UNDP)</p>
		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional</p>	<p>Terkoordinasinya Penyusunan Rencana Teknis Program Rehabilitasi Mangrove di beberapa calon lokasi tanam mangrove</p>	<p>Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan</p>	<p>Tercapainya Penyusunan Rencana Teknis Program Rehabilitasi Mangrove di beberapa calon lokasi tanam mangrove pada 2023.</p>	<p>1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan;</p> <p>2. Perbaikan Ekologi pada lingkungan sekitar ekosistem mangrove;</p> <p>Pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar.</p>	<p><b>TW 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Penjajakan Kerjasama Program Rehabilitasi Mangrove dengan Pemerintah Singapura</li> <li>2. Persiapan Skema Kerjasama Pendanaan Rehabilitasi Mangrove M4CR</li> <li>3. Rapat Koordinasi Teknis Mangrove Alliance for Climate (MAC) dan rencana pembangunan MBZMIRC Pemerintah UAE</li> </ol> <p><b>TW 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakor Teknis pembahasan Metode Inventarisasi Mangrove</li> <li>2. Follow Up meeting dengan pihak UAE</li> <li>3. Pengajuan draft revisi Kepmenko Pokja Mangrove untuk diperiksa (legal scrubbing) dan proses penandatanganan;</li> </ol> <p><b>TW 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Draft KepMenko Pokja Mangrove (KKMN) oleh biro hukum dan proses pengajuan tandatangan Bapak Menko;</li> <li>2. Kunjungan Lapangan Delegasi MoCCA ke Belitung pada tanggal 19 – 23 Juli 2023</li> <li>3. Fiksasi lokasi dan luasan pilot Project blue carbon dengan K/L, Pemda Kaltara dan Mitra strategis</li> </ol>

							<p><b>TW 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian pendanaan berdasarkan musim tanam mangrove dengan cara membuka wacana skema pendanaan dana siap pakai (DSP) contoh di BNPB.</li> <li>2. penyelarasan program budidaya (KKP) dengan rehabilitasi mangrove (KLHK) dengan memunculkan konsep silvofishery.</li> <li>3. penganekaragaman spesies mangrove (jenis bibit) pada satu area tanam.</li> <li>4. Memperluas Lembaga pengawasan di lokasi rehabilitasi.</li> </ol>
		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pencapaian Target National Determined Contribution (NDC) Unconditional</p>	<p>Terkoordinasinya penyusunan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)</p>	<p>Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan</p>	<p>Terbitnya peraturan turunan Perpres 98/2021 sehingga dapat operasional dan implementatif:</p> <p>Peraturan Menko Marves tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon</p> <p>Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik</p> <p>Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Peraturan OJK tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Pajak Karbon</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan</p>	<p>Pemenuhan komitmen nasional dalam pengurangan emisi GRK</p> <p>3. Terkendalinya Perubahan Iklim dan Pemanasan Global dengan peningkatan tidak melebihi 1,5 derajat</p>	<p><b>TW 1:</b></p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pendampingan Penyusunan peraturan turunan Perpres 98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional</p> <p><b>TW 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Permen LHK No.7 Tahun 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan pada tanggal 14 Juni 2023</li> </ol> <p><b>TW 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan kembali draft RPermen LHK Perdagangan Karbon Luar Negeri hasil masukan K/L dan legal drafting</li> <li>2. Penandatanganan Implementing Arrangement UK- Pact pada tanggal 24 Juli 2023</li> <li>3. Terbitnya POJK No. 14 Tahun 2023</li> </ol>



					<p>tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon</p> <p>Peraturan tata cara perdagangan karbon atau NEK untuk Sektor Energi (Transportasi), Pertanian, IPPU, dan Limbah</p> <p>Pengembangan kerjasama luar negeri dengan United Kingdom untuk implementasi pasar karbon.</p>		<p>tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon pada tanggal 2 Agustus 2023</p> <p>4. Terbitnya SE OJK No. 12/SEOJK.04/2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon pada tanggal 6 September 2023</p> <p>5. Launching Bursa Karbon yang dilaksanakan oleh OJK Pada tanggal 26 September 2023</p> <p><b>TW 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi Permen LHK tentang tata cara perdagangan karbon luar Negeri</li> <li>2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pertemuan Technical Committee United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions Carbon Pricing Programme (UK PACT)</li> </ol> <p>Harmonisasi Draft RPermen LHK terkait National Determined Contribution (NDC)</p>
		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi</p>	<p>Terkoordinasinya pengolahan sampah terintegrasi di 6 (enam) lokasi</p>	<p>Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah</p>	<p>Tercapainya koordinasi pengelolaan sampah terintegrasi di 6 (enam) lokasi</p>	<p>4. Tertanganinya sampah yang tidak terkelola di 6 lokasi dengan potensi sampah terolah sebesar 3000 ton/hari</p>	<p><b>TW 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terbangun 4 TPST di Denpasar, Bali <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPST Tahura I (commisioning)</li> <li>b. TPST Tahura II (commisioning)</li> <li>c. TPST Padang Sambian (commisioning)</li> <li>d. TPST Kesiman Kertalamgu: telah diresmikan oleh Presiden pada Maret 2023</li> </ol> </li> <li>- TPST yang di bangun di Denpasar merupakan percepatan pengelolaan sampah di Bali pada event G20 dengan pendaanan bauran pendanaan (Swasta+Pemda+Pempus)</li> </ul> <p><b>TW 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPST RDF Bantar Gebang telah diresmikan yang memiliki</li> </ul>

						<p>kapasitas 2.000 ton/hari yang direncanakan akan digunakan untuk pengolahan 1.000 ton sampah baru dan 1.000 ton untuk landfill mining</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPST RDF Bantar Gebang sudah dikoordinasikan oleh Kemenko Marves sejak Tahun 2021, namun pengoperasian TPST ini baru berjalan pada tahun 2023.</li> <li>- TPST Bantar Gebang merupakan TPST yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta, Teknologi yang digunakan merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Bahan bakar RDF digunakan untuk pembakaran di 2 pabrik semen yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Bangun Solusi Indonesia</li> </ul> <p><b>TW 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPST Cicukang Oxbow di Bandung saat ini sedang dalam tahap commissioning alat, Hingga bulan agustus kapasitas sampah terolah sebesar 10 ton/hari dari target 20 ton/hari.</li> <li>- TPST Cicukang Oxbow Kabupaten Bandung berlokasi di Kecamatan Margaasih, Kelurahan Mekarrahayu dengan luas lahan 1.4 ha. Akses jalan menuju TPST melewati jalan cicukang dengan lebar jalan akses sebesar kurang lebih 3 meter. Jenis infrastruktur terbangun merupakan teknologi RDF dan BSF</li> <li>- Identifikasi awal keadaan sosial:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terletak di lahan oxbow Dirjen SDA BBWS CC, diizinkan untuk pembangunan atas diskresi</li> <li>b. Terdapat salah satu KSM yang sebelumnya telah menjalankan operasional sampah di area</li> </ol> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>mekarrahayu, namun belum dengan pengolahan yang sesuai kaidah.</p> <p>- Kelengkapan Readiness Criteria:</p> <p>a. Sudah terdapat surat dari Pemda berupa surat minat, surat dukungan DPRD;</p> <p>b. Penetapan Lokasi : Rekomtek dengan nomor PS.03.01/DA/770</p> <p>c. Bukti Kepemilikan Lahan : Izin Pemanfaatan Oxbow dengan nomor PS.03.01-Mn/1997</p> <p>d. Kesiapan Menyusun Dokumen Lingkungan : Sudah ada Dokumen UKL-UPL</p> <p>Surat Kesiapan Menerima Aset : Ada</p> <p>- Kabupaten Bandung akan mendapat bantuan teknis berupa armada pengumpulan sampah dan pengangkutan residu.</p> <p><b>TW 4:</b></p> <p>Sampai dengan saat ini terdapat 11 TPST, 3 RDF terbangun, dan 1 RDF menambah kapasitas, dengan total kapasitas mencapai 3.295 ton/hari</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel. Daftar Isu- Isu Strategis rencana Kerja RB General di Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)	KEGIATAN UTAMA	URAIAN TARGET	VOLUME TARGET	VOLUME CAPAIAN	KET.
1	SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.4. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan Rencana Kerja, rencana Aksi dan Manual IKU Deputi PLK Tahun 2023	Dokumen Renja, Renaksi, dan Manual IKU	3 Dokumen	3 Dokumen	Tercapai
			2. Penyusunan Rencana Program Prioritas	Capaian Program Prioritas	100 %	100 %	Tecapai
			3. Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen PK	7 Dokumen	7 Dokumen	Tercapai
			4. Penyusunan Anggaran Deputi PLK Tahun 2023	Dokumen RAK-KL	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
			5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi PLK Tahun 2023	LAKIP Triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	Tercapai
			6. Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	75 &	-	-
2	SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	Hasil PMPZI	80	85,94	Melampaui
			2. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Matriks Pengisian KKE SPIP	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
			3. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi	3,6	3,81	Melampaui
	SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik	1. Pelaksanaan Penataan Arsip	Dokumen Arsip Aktif dan Inaktif	2 Dokumen	2 Dokumen	Tercapai

		sektoral	2. Pelaksanaan penilaian mandiri arsip internal	Hasil Penilaian Arsip Internal	80	88,20	Melampaui
		S.9. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	1. Kualitas Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA Deputi PLK	95 %	-	-
			2. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan	Laporan Keuangan Triwulan	4 Dokumen	2 Dokumen	Belum tercapai
3	SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Terinputnya SKP pegawai pada e- SKP (55 orang)	100 %	100 %	Tercapai
		S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	1. Pelaksanaan sosialisasi Core Values BerAKHLAK ASN	Indeks BerAKHLAK ASN Deputi PLK	65	-	-
			2. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Layanan Masyarakat.	3,6	3,72	Melampaui
			3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima	Laporan Monev penerapan SOP Standar Pelayanan	1 Dokumen	-	-

Adapun yang menjadi kendala didalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2023 secara umum adalah:

- Adanya perubahan arah kebijakan road map RB dari Kementerian PANRB sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2023, menyebabkan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Kerja RB tematik dan general Deputi PLK terlambat ditetapkan.

- Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap konsep pelaksanaan RB tematik dan general.
- Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk melakukan pengisian progress pelaksanaan RB Tematik baik di Dashboard Dynamic maupun website e-RB.

Adapun langkah yang ditempuh dalam rangka tindaklanjut didalam mengatasi kendala tersebut diatas adalah:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit keasdepan lingkup Deputi PLK, Biro Perencanaan dan Biro Hukum dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB tematik secara berkala dan berkelanjutan.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB general secara berkala.
- Melakukan sosialisasi pelaksanaan RB Tematik dan General (double track) lingkup Deputi PLK dengan mengundang narasumber Biro Hukum dan KemenPAN-RB.
- Melakukan sosialisasi Dashboard Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi Double Track (Dynamic) yang dikembangkan oleh tim RB Deputi PLK.
- Melakukan sosialisasi fitur terbaru e-RB yang telah ditambahkan menu RB Tematik dan RB General.

## **Indikator Kinerja 6 : Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dengan Target Nilai SAKIP sebesar 72.**

Merujuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI nomor 1 tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Evaluasi dilakukan pada empat komponen yaitu perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal.

Capaian untuk Indikator Kinerja pada Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan kehutanan, Sesuai dengan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nomor : B-44/INS/PW.01.00/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 di peroleh Hasil untuk Nilai Capaian sebesar **74,95** atau dengan tingkat akuntabilitas kinerja **BB**.

Tabel. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

No.	Komponen	Evaluasi AKIP 2023	
		Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	25	20,50
4.	Evaluasi Internal	15	10,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Nilai hasil evaluasi tahun 2023 ini telah melampaui target pada Perjanjian Kinerja Tahun **2023** yaitu sebesar **72**, dan juga target pada Rencana Strategis sebesar **74**. Capaian nilai Sakip ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Capaian pada tahun **2022** yaitu **70,75 ( Naik 4,2 Poin)**,

Tabel. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen	Hasil Evaluasi 2021		Hasil Evaluasi 2022	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	32,63	35	25,12
2.	Pengukuran Kinerja	36	23,61	30	22,24
3.	Pelaporan Kinerja	21	13,48	20	13,36
4.	Evaluasi Internal			15	10,03
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,72	100	70,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		BB	

Kenaikan Nilai SAKIP ini didukung oleh berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, diantaranya perbaikan perencanaan melalui Reviu Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, Perbaikan proses penganggaran serta monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan secara berkala. Hal selanjutnya yang dapat ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat yaitu Penetapan target yang sesuai dengan kriteria dan penyajian capaian kinerja yang lebih memadai.

## Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada awal TA. 2023 berdasarkan DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman No. SP. DIPA-120.01.1.350494/2023 tanggal pengesahan 17 November 2022 sebesar Rp. 14.500.000.000,-.

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2023 yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS berdasarkan Data SPP di Aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp. 14.248.671.059,- (99,90%) dari total pagu efektif pada akhir Triwulan IV sebesar Rp. 14.291.616.000,- yang merupakan pengurangan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,- dengan total Blokir Anggaran sebesar Rp. 208.384.000,-.

**Tabel 3. Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV TA. 2023 Lingkup Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

DESKRIPSI	PAGU EFEKTIF	REALISASI SAKTI	REALISASI SAKTI %	SISA	SISA %
<b>Deputi Bidang PLK</b>	14.291.616.000	14.248.671.059	99,90%	14.139.941	0,10%
<b>Asdep I</b>	2.167.781.000	2.166.806.367	99,96%	974.633	0,04%
<b>Asdep II</b>	1.521.436.000	1.520.202.837	99,92%	1.233.163	0,08%
<b>Asdep III</b>	1.844.166.000	1.843.665.851	99,97%	500.149	0,03%
<b>Asdep IV</b>	2.166.894.000	2.163.520.151	99,84%	3.373.849	0,16%
<b>Asdep V</b>	2.535.727.000	2.534.442.145	99,95%	1.284.855	0,05%
<b>Sesdep</b>	2.200.000.000	2.169.823.691	99,94%	1.371.309	0,06%
<b>Koordinasi</b>	1.855.612.000	1.850.210.017	99,71%	5.401.983	0,29%

Sedangkan berdasarkan data OMSPAN s.d per 31 Desember 2023 realisasi SP2D yang telah terbit sebesar Rp. **14.248.671.059,-** yang merupakan pengajuan melalui mekanisme pembayaran LS dan TUP.

Kinerja pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya dinilai dari segi kecepatan dan ketetapan didalam pengajuan SPP oleh masing-masing PPK di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ataupun kecepatan dan ketepatan dalam penerbitan PPSPM menerbitkan SPM untuk pengajuan percekungan dana di KPPN. Lebih dari itu kinerja pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan di Lingkup PPK dalam membuat dan menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan uang Negara sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan SPJ keuangan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan melalui mekanisme pengelolaan UP/GUP selama ini tidak mengalami kendala sama sekali, karena rata-rata dokumen pengajuan UP/TUP dapat diselesaikan paling lama 1 (satu) minggu dan seluruh dokumen sudah diselesaikan dalam bentuk dokumen rampung.



Pengelolaan SPJ Keuangan yang sedikit agak mengalami kendala adalah SPJ Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan LS, karena sebagian besar kegiatan dilakukan dengan LS. Jumlah SP2D LS dan UP/TUP pada Triwulan IV TA 2023 sebanyak 1222 dokumen, yang terdiri dari SP2D LS Bendahara sebanyak 947 berkas dokumen, SP2D TUP sebanyak 57 berkas dokumen SP2D, dan Pajak sebanyak 218 berkas dokumen dengan total realisasi OMSPAN senilai Rp. 14.248.671.059,-

## MASALAH DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang terjadi selama ini.

- a) Pelaksanaan pengajuan keuangan di Triwulan I melalui mekanisme dokumen elektronik pada satu sisi memperlancar pengajuan keuangan tetap berjalan, tetapi di lain sisi menyisakan pekerjaan tindaklanjutnya menjadi dokumen fisik.
- b) Perencanaan anggaran kurang optimal sehingga masih sering dilakukan revisi anggaran;
- c) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum efektif;
- d) Belum siapnya aplikasi keuangan internal dilevel Kemenko (Marves Finance) pada awal T.A 2023 yang dapat digunakan oleh pengelola keuangan Kedeputian sehingga diperlukan alternatif penggunaan aplikasi keuangan internal lainnya yaitu penggunaan aplikasi SATUGARPU pada unit Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- e) Kebijakan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas pada TA 2023 akan dilaksanakan penyesuaian mengikuti Peraturan PMK 113/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- f) Pada TA 2023 pelaksanaan realisasi anggaran untuk Deputi Bidang PLK baru dilaksanakan pada bulan Februari 2023;
- g) Terdapat penambahan anggaran pagu efektif yang berasal dari pembukaan pagu blokir yang diusulkan menjadi anggaran dukungan kegiatan *World Water Forum* (WWF).
- h) Terdapat Kerjasama penggunaan anggaran ABT yang dikelola Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan kinerja serta tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan setiap bulan sekali. Tujuan utama dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. Menilai pelaksanaan anggaran kegiatan, sehingga dapat teridentifikasi apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.

2. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran kegiatan untuk periode berikutnya;
4. Melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran s.d Triwulan IV TA 2023;

## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun berdasarkan realisasi dari rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama bulan Januari – Maret 2023 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktifitas di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala, baik internal maupun eksternal, yaitu:

### 1.1. Internal

- a. Kekurangan jumlah tenaga (pejabat dan pegawai pelaksana) Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan masih belum teratasi/terpenuhi.
- b. Masih terdapat pelaksana kegiatan yang belum dapat memfokuskan dan menjabarkan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi utama bagian/unitnya.

### 1.2. Eksternal

- a. Masih banyak regulasi dan atau kewenangan yang tumpang tindih serta adanya ego sektoral Kementerian/Lembaga, pemda yang dapat menghambat lajunya pembangunan di bidang kemaritiman.
- b. Fluktuasi kondisi ekonomi regional dan global.

Laporan ini diharapkan mampu memenuhi akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dan menjadi bahan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan  
Lingkungan dan Kehutanan



**Nani Hendiarti**

## LAMPIRAN

## NILAI KINERJA ORGANISASI

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan  
Tahun Anggaran 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tipe Indikator	Bobot	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian	Bobot x Persentase Capaian	
1 Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang Efektif dan Berkelanjutan	1 Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK dalam Mendukung Pencapaian Target NDC	<i>Ultimate Outcome</i>	0,4	2,0%	6,9%	120%	0,480	
	2 Persentase Pengurangan Sampah Laut	<i>Ultimate Outcome</i>	0,4	50,85%	41,68%	81,97%	0,328	
2 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3 Persentase rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	<i>Immediate Outcome</i>	0,2	100%	100%	100,00%	0,200	
	4 Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan	<i>Immediate Outcome</i>	0,2	100%	100%	100,00%	0,200	
3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	5 Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	<i>Intermediate Outcome</i>	0,3	90	85,94	95,49%	0,287	
	6 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	<i>Intermediate Outcome</i>	0,3	72	74,95	104,10%	0,312	
<b>TOTAL BOBOT</b>			<b>1,8</b>		<b>TOTAL PENILAIAN</b>		<b>1,807</b>	
							<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>	100,389
							<b>PREDIKAT NILAI</b>	ISTIMEWA

**Keterangan**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) =  
Total Penilaian / Total Bobot

Predikat Nilai	
Istimewa	100 < NKO ≤ 120
Baik	90 ≤ NKO ≤ 100
Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO < 90
Kurang	50 ≤ NKO < 70
Sangat Kurang	< 50

